

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembelanjaan negara yang semakin lama semakin bertambah besar memerlukan penerimaan negara yang berasal dari dalam negeri tanpa harus bergantung dengan bantuan atau pinjaman dari luar negeri. Hal ini berarti, bahwa seluruh pembiayaan negara harus dibiayai dari pendapatan negeri dalam hal ini yaitu pendapatan pajak dan pendapatan bukan pajak. (M. Said, 2003).

Pajak sendiri yang berarti iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang —sehingga dapat dipaksakan— dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. (<http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak>)

Pajak dipandang sebagai bagian yang sangat penting di dalam penerimaan negara, kondisi penerimaan negara tidak lagi semata-mata dari penerimaan negara berupa minyak dan gas bumi, tetapi lebih berupa untuk lebih menjadikan pajak sebagai primadona negara. Pada dasarnya pemungutan pajak oleh negara merupakan wujud dari rasa pengabdian, kewajiban, dan partisipasi rakyat, yang dalam hal ini Wajib Pajak secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakannya guna membiayai pengeluaran dan pembangunan nasional. (Waluyo, 2008:5).

Hasil dari penerimaan pajak tersebut digunakan untuk mengisi dan membiayai keperluan belanja negara, untuk itu negara memerlukan dana yang cukup besar untuk membiayai kegiatan yang berlanjut dan berkesinambungan. Pajak dibedakan menjadi dua fungsi yaitu fungsi *budgetair* (anggaran) dan sebagai *regulerend* (mengatur). Fungsi *budgeting* yang artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik pengeluaran rutin maupun pembangunan. Sedangkan fungsi *regulered* artinya pajak sebagai alat untuk mengatur dalam bidang sosial, politik, ekonomi, budaya dan lain sebagainya yang sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah diatur oleh Pemerintah. Dari fungsi ini, pada dasarnya Pemerintah ingin menegaskan betapa pentingnya peran pajak sebagai penerimaan negara. (Siti Resmi, 2008:3).

Peranan Pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak terus dilakukan, salah satu diantaranya dimulai dengan reformasi perpajakan secara menyeluruh pada tahun 1983 dan sejak itulah Indonesia menganut pemungutan pajak dengan menganut sistem *self assessment*. Penerapan *self assessment system* akan efektif apabila kondisi kepatuhan sukarela pada masyarakat sudah terbentuk dengan baik. (Darmayanti, 2004).

Kesadaran Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan Wajib Pajak mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam perhitungan besarnya pajak yang terutang dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Kesadaran Wajib Pajak menjadi penting karena dengan ketidakpatuhan secara bersamaan akan menimbulkan

upaya menghindarkan pajak yang mengakibatkan berkurangnya setoran dana pajak ke kas negara. (Sofyan, 2005).

Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam upaya peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak. Dengan demikian, pengkajian terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan akan kesadaran Wajib Pajak sangat perlu mendapatkan perhatian. Namun dalam kenyataannya masih banyak Wajib Pajak yang sengaja untuk tidak bersedia membayar tagihan pajak baik itu dalam pelunasan, tidak melaporkan SPT Masa maupun SPT Tahunan. Sehingga penyampaian SPT kepada Wajib Pajak yang bersangkutan harus lebih awal atau paling tidak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, dengan harapan Wajib Pajak segera melapor kembali atas tagihan pajaknya tersebut. Apabila penyampaian SPT Tahunan kurang efektif atau terlambat, akan membuka peluang bagi Wajib Pajak untuk melakukan tunggakan saat membayarkan pajaknya. Sehingga kondisi tersebut perlu diperhatikan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara.

Perlunya kesadaran pembayaran pajak oleh Wajib Pajak sangat berkaitan dan mempengaruhi besarnya penerimaan pajak di suatu daerah, utamanya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara. Kesadaran pribadi akan pajak oleh Wajib Pajak sangat diperhatikan oleh Pemerintah, setelah mencuat kasus yang pernah muncul karena oknum pajak sedikit banyak mempengaruhi kesadaran Wajib Pajak akan pembayaran pajak utamanya pembayaran pajak secara *self assesment system*. Sehingga menjadi tugas Pemerintah setempat untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap manfaat pajak.

Besarnya tingkat kesadaran Wajib Pajak akan menambah tingginya penerimaan pajak sehingga dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dengan penerimaan pajak yang dikelola dengan baik maka kesejahteraan masyarakat akan dicapai.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan di atas dengan mengambil judul **“ANALISIS KESADARAN WAJIB PAJAK PRIBADI TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JEPARA TAHUN 2008-2010”**.

1.2 Ruang lingkup masalah

Permasalahan yang berkaitan dengan kesadaran Wajib Pajak dan penerimaan pajak yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Jepara, maka dalam penelitian ini masalah yang akan diteliti dibatasi dengan sebagai berikut :

Penelitian ini menitikberatkan pada permasalahan yang berkaitan dengan kesadaran Wajib Pajak Pribadi terhadap penerimaan Wajib Pajak khususnya Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kabupaten Jepara periode 2008-2010.

1.3 Rumusan masalah

Berpijak pada uraian latar belakang, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah kesadaran masyarakat Jepara akan pajak yang ditanggungnya, baik itu dalam pendataan Wajib Pajaknya, pelaporan SPT sudah patuh?
2. Apakah penerimaan pajak penghasilan orang pribadi (PPh OP) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara pada tahun 2008 sampai dengan 2010 sudah termasuk patuh dalam pelaporannya?

1.4 Tujuan penelitian

Dengan melaksanakan penelitian agar mempunyai sasaran yang jelas dan sesuai yang dikehendaki, maka perlu ditetapkan suatu tujuan diadakannya penelitian. Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tingkat kesadaran Wajib Pajak terhadap pajak pribadi melalui pelaporan SPT di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara tahun 2008 sampai tahun 2010.
2. Untuk mengetahui jumlah penerimaan pajak terhadap Wajib Pajak Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara tahun 2008 sampai tahun 2010.

1.5 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kegunaan bagi beberapa pihak, antara lain:

1. Bagi Penulis
 - a. Untuk menambah wawasan pengetahuan dan pemikiran dalam akuntansi khususnya perpajakan.
 - b. Sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian sidang komprehensif dan ujian sidang skripsi S1 Akuntansi.
2. Bagi Akademik
 - a. Bagi cabang ilmu pengetahuan, khususnya akuntansi, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengetahuan tambahan tentang pentingnya kesadaran Wajib Pajak akan pajak yang ditanggungnya. Dimana penerimaan pajak tersebut digunakan untuk pembangunan daerah.
3. Bagi Pemerintah
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan yang berguna dalam menerapkan kebijakan dalam hal perpajakan mengenai tingkat kesadaran Wajib Pajak Pribadi.
 - b. Sebagai bahan masukan instansi terkait dalam rangka mengupayakan dan meningkatkan mutu dalam tata cara pelaksanaan Pajak Penghasilan utamanya pajak orang pribadi.
4. Bagi Masyarakat

- a. Dengan penelitian ini diharapkan partisipasi masyarakat untuk mengembangkan perekonomian daerah lewat pajak.
- b. Diharapkan masyarakat mengetahui betapa pentingnya kesadaran mereka akan pajak yang ditanggung adalah untuk kesejahteraan mereka sendiri

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini yang merupakan laporan dari hasil penelitian, terdiri dari lima bab yang merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain, yang masing-masing bab berisi:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini menguraikan secara singkat masalah penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah, ruang lingkup masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

BAB II : Landasan Teori

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang berkaitan dengan materi yang akan dibicarakan yang meliputi antara lain Pengertian Pajak, Tata Cara Pemungutan Pajak, Sistem Pemungutan Pajak, Sejarah Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan Di Indonesia, Pengertian Pajak Penghasilan, Surat Pemberitahuan (SPT), Kesadaran Wajib Pajak, Kerangka Pemikiran Teoritis.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini menguraikan tentang Lokasi Penelitian, Waktu Penelitian, Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel, Jenis Dan

Sumber Data, Populasi, Metode Pengumpulan Data, Metode Pengolahan Data Penelitian, Metode Analisis Data.

BAB IV : Hasil dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari Gambaran Umum Obyek Penelitian, Penyajian Data, Analisis Data Dan Pembahasan.

BAB V : Penutup

Bab ini berisi tentang penelitian yang diperoleh dari hasil pembahasan serta semua yang diperoleh sehubungan kesimpulan dan saran yang diambil.